



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR SOP	188/ 5683 /SEKR.1/429.202/2025
TGL. PEMBUATAN	03 Oktober 2022
TGL. REVISI	15 September 2025
TGL. EFEKTIF	15 September 2025
DISAHKAN OLEH	<p>CAHYANTO HENDRI WAHYUDI, SE. NIP. 19760310202121005</p>
NAMA SOP	Pencairan ADD, BHPD dan BHRD
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020. 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi tentang penyaluran ADD, BHPD dan BHRD 2. Mampu mengoparsionalkan komputer dan jaringan
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	DPA, SK besaran ADD, BHPD dan BHRD, Komputer dan perlengkapannya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di desa	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pelaksana	PPTK	Bendahara	PPK	PA	Kuasa BUD	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima pengajuan pencairan dari desa							Permohonan pencairan dan dok pendukung		Permohonan pencairan dan dok pendukung
	Melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pencairan dari desa pada portal https://spjdesa.banyuwangikab.go.id , dan melakukan koreksi terhadap kuasa pemotongan 1 % siltap untuk iuran bpjs KP desa							Permohonan pencairan dan dok pendukung		Cecklist kelengkapan
2.	Membuat nota dinas pencairan							Cecklist kelengkapan		Nota Dinas Pencairan
3.	Memberikan persetujuan							Nota Dinas Pencairan		Persetujuan
4.	Membuat Surat Perimintaan pembayaran (SPP)							Persetujuan PA		SPP

5.	Memeriksa kelengkapan SPP							SPP		Ceklist pemeriks aan SPP
6.	Menerbitkan SPM							Ceklist pemeriks aan SPP		SPM
7.	Penerbitan SP2D							SPM		SP2D